



Irfan Mangkunegara

BPK RI, Indonesia

irfan.mangkunegara@bpk.go.id



## **THE EFFECT OF FINANCIAL CHARACTERISTIC AND AUDIT FINDINGS ON THE PUBLIC WELFARE IN THE NORTH SUMATERA PROVINCE)**

## **PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAN HASIL PEMERIKSAAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

### ABSTRACT/ABSTRAK

*One of the implications of desentralization is a performance measurement of local government. Local government performance can be seen from the Evaluation of Local Government Performance score (Mustikarini & Fitriyani, 2012), efficiency ratio (Marfiana & Kurniasih, 2013) and the Human Development Index (Prasetyaningsih, 2015). HDI is also an indicator for public welfare, so it can be concluded that local government performance can be measured from the level of its public welfare. This research aimed to described the relationship between financial characteristics of local government and BPK's audit findings. It uses 34 data from local governments in North Sumatera from 2011 to 2013, and refers to research model that is composed by Prasetyaningsih (2015). Research shows that financial characteristic of local government (total asset and capital expenditure) and audit finding have significant effect to HDI in local government of North Sumatera Province within 2011-2013 period.*

#### **KEYWORDS:**

*audit findings, public welfare, performance measurement, local government.*

Salah satu implikasi dari desentralisasi adalah pengukuran kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Mustikarini dan Fitriyani, 2012), rasio efisiensi (Marfiana dan Kurniasih, 2013) dan Indeks Pembangunan Manusia (Prasetyaningsih, 2015). IPM juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan karakteristik keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diprosikan dengan IPM. Kajian ini mengacu pada model penelitian yang disusun oleh Prasetyaningsih (2015) dengan data panel dari 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara selama tahun 2011-2013. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara karakteristik keuangan daerah (total aset dan belanja) dan hasil pemeriksaan atas IPM di Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode Tahun 2011-2013.

#### **KATA KUNCI:**

Hasil pemeriksaan, kesejahteraan masyarakat, pengukuran kinerja, pemerintah daerah.

#### **SEJARAH ARTIKEL:**

**Diterima pertama:** Oktober 2015

**Dinyatakan dapat dimuat :** Desember 2015

## PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan utama pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi. Pada hakekatnya, pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Implikasinya peran pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan penyampaian tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karenanya, diperlukan adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur capaian pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan variabel yang berbeda-beda dalam melakukan pengukuran kinerja. Marfiana dan Kurniasih (2013) menggunakan variabel kinerja keuangan berupa rasio efisiensi. Mustikarini dan Fitriyani (2012) menggunakan nilai/*score* Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sedangkan, Prasetyaningsih (2015) menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mengukur kinerja pemerintah. Menurut Akbar dan Djazuli (2015), IPM yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan selain (1)Tingkat pertumbuhan ekonomi, (2) Produk domestik regional bruto, (3)Tingkat kemiskinan, (4)Tingkat pengangguran, dan (5)Rasio gini, sehingga dapat disimpulkan, kinerja pemerintah dapat terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk mencapai kinerja yang baik dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Karakteristik pengelolaan sumber daya keuangan dapat digambarkan dalam pengelolaan aset dan belanja yang tersaji dalam neraca dan laporan realisasi anggaran yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah ini kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini merupakan mandat dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kajian ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan karakteristik keuangan pemerintah daerah dan temuan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diprosikan dengan IPM. Kajian ini menggunakan model penelitian yang disusun oleh Prasetyaningsih (2015) dengan data panel dari 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara selama tahun 2011-2013. Secara rinci kajian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah aset daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah hasil pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

Kajian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## METODE KAJIAN

### Kerangka Teori

#### Karakteristik keuangan pemerintah daerah

Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) mendefinisikan karakteristik pemerintah daerah sebagai ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah pemerintah daerah, dan membedakannya dengan pemerintah daerah lain. Telah beberapa kali dilakukan penelitian yang menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah, antara lain :

1. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menguji karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian tersebut, variabel yang digunakan untuk memproksikan karakteristik pemerintah daerah adalah ukuran daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah, dan status pemerintah daerah.
2. Mustikarini dan Fitriyani (2012) menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dengan variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pusat dan belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Marfiana dan Kurniasih (2013) memproksikan karakteristik pemerintah daerah dengan variabel total aset, porsi PAD terhadap total pendapatan, porsi DAU terhadap total pendapatan, total belanja daerah, dan jumlah anggota legislatif.
4. Prasetyaningsih (2015) menggunakan variabel total aset dan total belanja untuk memproksikan karakteristik pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel total aset dan belanja modal untuk menggambarkan karakteristik keuangan pemerintah daerah. Belanja modal digunakan penulis untuk mengganti variabel total belanja yang digunakan oleh Prasetyaningsih (2015), karena hasil penelitian Prasetyaningsih menunjukkan variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Alasan lain yang digunakan penulis adalah saran untuk mengganti variabel total belanja menjadi belanja modal yang dikemukakan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012). Variabel yang digunakan sebagai proksi karakteristik keuangan pemerintah dalam model kajian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Aset

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pernyataan SAP Nomor 1 mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

#### 2. Belanja modal

Berdasarkan Pernyataan SAP Nomor 2, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan lain-lain.

Belanja modal dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu belanja publik dan belanja aparatur. Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat misalnya pembangunan jembatan, irigasi, gedung sekolah, mobil ambulan dan lain-lain. Sedangkan belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan langsung oleh aparatur misalnya pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas dan lain-lain.

### Hasil pemeriksaan

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 30 dan 31, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil akhir dari pemeriksaan keuangan adalah

opini; pemeriksaan kinerja adalah kesimpulan dan rekomendasi; sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan. Pada pemeriksaan keuangan, BPK tidak hanya memberikan opini namun juga menilai tingkat efektifitas SPI dan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada LHP BPK dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perjalanan dinas fiktif;
2. Belanja atau pengadaan fiktif lainnya;
3. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan;
4. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
5. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
6. Pemahalan harga (*mark up*);
7. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi;
8. Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan;
9. Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan;
10. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak;
11. Belanja tidak sesuai ketentuan atau melebihi ketentuan; dan
12. Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah/perusahaan tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan.

Mustikarini dan Fitriyanti (2012) menggunakan variabel hasil pemeriksaan yang berupa ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Prasetyaningih (2015) juga menggunakan

variabel hasil pemeriksaan yang mengacu pada hasil pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Secara lebih detail Prasetyaningsih menggunakan nilai hasil pemeriksaan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara. Sedangkan Marfiana dan Kurniasih (2013) menggunakan variabel nilai hasil pemeriksaan dan opini BPK. Kajian ini menggunakan nilai hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara untuk menjelaskan variabel hasil pemeriksaan.

### Kesejahteraan masyarakat

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Prasetyaningsih (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh karakteristik keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah yang diproksikan dengan variabel IPM. Sedangkan menurut Akbar dan Djazuli (2015), IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (www.bps.go.id).

### Desain, Model dan Skema Kajian

Kajian ini menggunakan desain penelitian kausalitas, yaitu desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Desain ini memunculkan variabel penyebab (*independent*), variabel antara dan variabel terikat (*dependent*). Uma Sekaran (2013) pada Prasetyaningsih (2015) menyatakan bahwa dalam penelitian kausalitas, peneliti menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan suatu permasalahan. Kajian ini menggunakan model penelitian yang digunakan Prasetyaningsih (2015) terdiri dari variabel *dependent* (IPM) dan variabel *independent* (total aset, total belanja modal serta hasil pemeriksaan) sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Ln}X_{1it} + \beta_2 \text{Ln}X_{2it} + \beta_3 \text{Ln}X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (variabel dependen/Y)

$\alpha$  = konstan

$\beta$  = koefisien

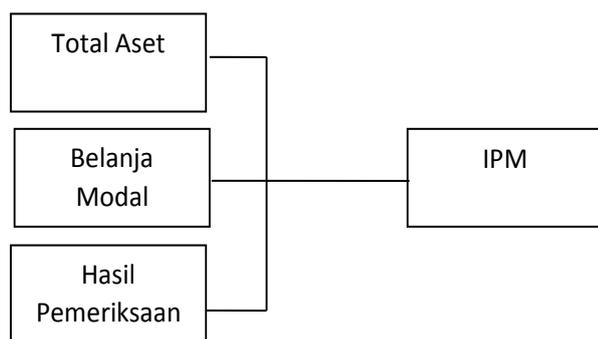
$\text{Ln}X_1$  = Logaritma Natural Total Aset (variabel independen)

$\text{Ln}X_2$  = Logaritma Natural Belanja Modal (variabel independen)

$\text{Ln}X_3$  = Logaritma Natural Hasil Pemeriksaan (variabel independen)

$e$  = *error*

Skema penelitian yang digunakan dalam kajian ini dapat dijelaskan pada gambar 1.



Gambar 1. Skema Penelitian

### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder. Data total aset dan belanja modal adalah data yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi, 8 Pemerintah Kota dan 25 Pemerintah Kabupaten. Data hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah berasal dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK yang diunduh dari situs resmi BPK ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Sedangkan data IPM diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang diunduh dari situs resmi BPS ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id)). Periode data yang diambil adalah dari tahun 2011-2013.

### Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis data statistik dengan regresi data panel. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data dalam bentuk *excel* (terlampir). Variabel penyebab/*dependent* kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural agar dapat lolos pengujian asumsi klasik. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas). Langkah terakhir, adalah pengujian regresi data panel *estimated generalized least square* (EGLS)/*ordinary least square* (OLS).

Pengujian asumsi klasik dan regresi data panel menggunakan *software* olah data Eviews7.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Asumsi Klasik

#### Uji normalitas data

Hasil pengujian normalitas data menggunakan *software* Eviews7 dapat dilihat pada gambar 2. Karena nilai *p-value* (*probability*)  $0,074394 > 0,05$  maka dapat disimpulkan data terdistribusi dengan normal.

#### Uji multikolinieritas

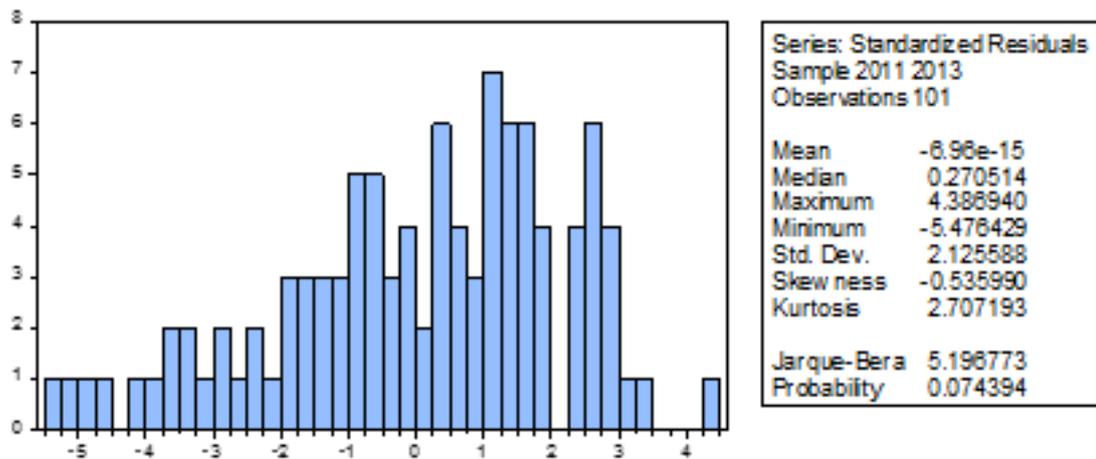
Hasil pengujian multikolinieritas variabel penyebab/*independent* menggunakan *software* Eviews7 dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel 1 dapat kita lihat tidak ada variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi.

#### Uji heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan *software* Eviews7 dapat dilihat pada gambar 3. Pada gambar 3, dapat kita lihat residualnya tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Pengujian Regresi Data Panel

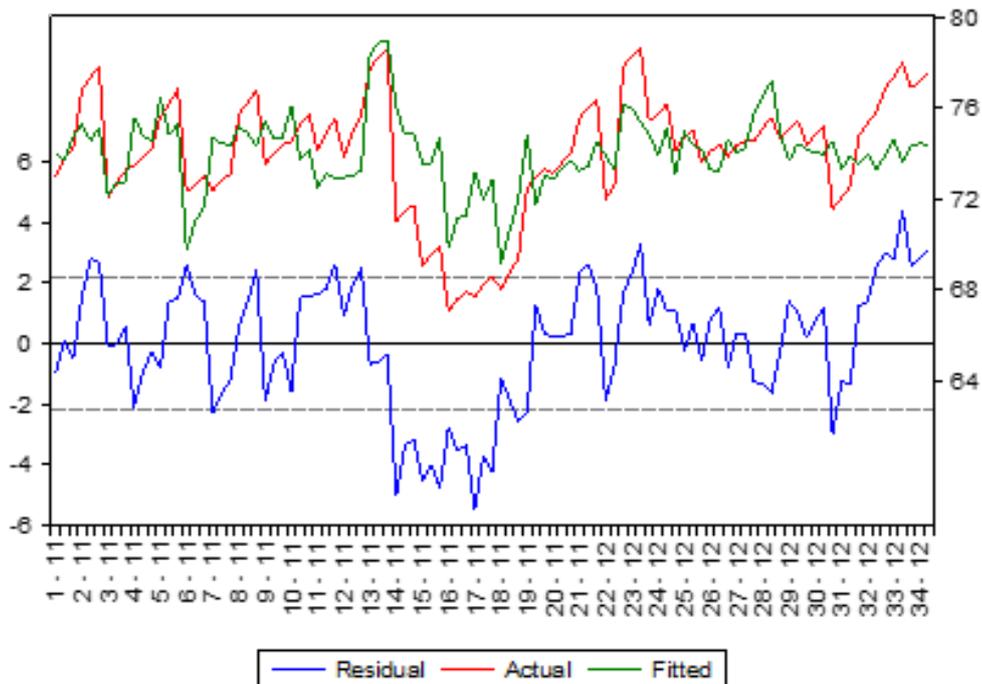
Dari hasil uji asumsi klasik di atas, dapat disimpulkan data telah lolos uji asumsi klasik yang berarti uji regresi data panel menggunakan EGLS untuk model penelitian dapat dilakukan. Hasil dari pengujian regresi model kajian ini dapat dilihat pada tabel 2. Hasil Uji Regresi Data Panel EGLS.



Gambar 2. Uji normalitas data

Tabel 1. Hasil uji multikolinearitas

	LN Aset	LN Belanja Modal	LN Hasil Pemeriksaan
LN Aset	1,000000	0,691941	0,249877
LN Belanja Modal	0,691941	1,000000	0,405096
LN Hasil Pemeriksaan	0,249877	0,405096	1,000000



Gambar 3. Uji heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Data Panel EGLS

Dependent Variabel: IPM				
Method: Panel EGLS (Period weights)				
Date: 10/01/15 Time: 09:50				
Sample: 2011 2013				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 34				
Total panel (unbalanced) observations: 101				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
White period standard errors & covariance (d.f. corrected)				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59.53542	5.060875	11.76386	0.0000
LN_ASET	2.467646	0.534328	4.618222	0.0000
LN_BM	-1.460139	0.769199	-1.898259	0.0607
LN_Hasil Pemeriksaan	-0.427476	0.226755	-1.885188	0.0625
Effects Specification				
Period fixed (dummy variabls)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.405469	Mean dependent var	74.35938	
Adjusted R-squared	0.374178	S.D. dependent var	5.018543	
S.E. of regression	2.140844	Sum squared resid	435.4052	
F-statistic	12.95797	Durbin-Watson stat	0.231165	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.398834	Mean dependent var	74.01733	
Sum squared resid	435.7169	Durbin-Watson stat	0.235203	

Pada tabel 2 dapat kita lihat nilai Prob (*F-Statistic*) bernilai 0,000000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama/simultan variabel *independent* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan kesejahteraan masyarakatnya/IPM. Sedangkan jika dilihat dari nilai *Adjusted R-Square* yang sebesar 0,374178 (37,4178%), maka secara statistik disimpulkan bahwa IPM dapat dijelaskan oleh total aset, belanja modal dan hasil pemeriksaan. Sementara 62,5822% variasi IPM dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel *independent* dalam model penelitian ini.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa masing-masing variabel *independent* (total aset, belanja modal dan hasil pemeriksaan) berpengaruh signifikan secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel *dependent* (IPM). Interpretasi hasil uji statistik regresi masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Total aset memiliki nilai *t-statistic* sebesar 4,618222 dengan nilai prob 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel total aset berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan tingkat keyakinan 99% (nilai prob tidak lebih dari 1% atau 0,01).
2. Belanja modal memiliki nilai *t-statistic* sebesar -1,898259 dengan nilai prob 0,0607. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dengan tingkat keyakinan 90% (nilai prob tidak lebih dari 10% atau 0,10).
3. Hasil pemeriksaan memiliki nilai *t-statistic* sebesar -1,885188 dengan nilai prob 0,0625. Hal ini menunjukkan bahwa variabel hasil pemeriksaan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dengan tingkat keyakinan 90% (nilai prob tidak lebih dari 10% atau 0,10).

## KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas, maka pertanyaan dalam kajian ini telah dapat dijawab dan disimpulkan sebagai berikut :

1. Total aset berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, semakin besar aset yang dikelola pemerintah daerah di Sumatera Utara akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan Prasetyaningsih (2015) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah/total aset berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mustikarini dan Fitriyani (2012) juga menyatakan bahwa total aset berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang diprosikan dengan nilai/skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, semakin besar belanja modal pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil kajian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) yang menyatakan belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan pengelolaan belanja modal di pemerintah daerah Sumatera Utara belum fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja modal untuk publik yang lebih kecil dari belanja modal untuk aparatur atau belanja modal yang

belum dialokasikan secara optimal untuk menunjang tiga dimensi dasar IPM dimungkinkan sebagai faktor yang menunjukkan pengaruh negatif belanja modal terhadap IPM. Namun, hal ini perlu diuji pada penelitian selanjutnya.

3. Hasil pemeriksaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, semakin besar hasil pemeriksaan di suatu pemerintah daerah, maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pemeriksaan yang dimaksud di sini adalah hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi kerugian negara, sehingga dapat disimpulkan tingkat kebocoran anggaran akan menyebabkan sulitnya pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini konsisten dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012); Marfiana dan Kurniasih (2013) dan Prasetyaningsih (2015) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

## SARAN

Seluruh variabel independen dalam kajian ini (total aset, belanja modal dan hasil pemeriksaan) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diprosikan dengan IPM. Implikasi dari kajian ini adalah pemerintah daerah yang berorientasi menyejahterakan masyarakat hendaknya dapat mengelola aset dan belanja modal dengan baik. Usaha untuk meningkatkan aset daerah akan ikut juga meningkatkan nilai IPM. Peningkatan aset daerah ini diantaranya merupakan konsekuensi dari belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, kajian ini menunjukkan semakin tinggi belanja modal maka IPM justru semakin menurun. Oleh karenanya, pengelolaan belanja modal

hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah. Belanja modal untuk publik harus dialokasikan lebih besar daripada belanja modal untuk aparatur sehingga dapat tepat mengenai dimensi dasar IPM. Misalnya, alokasi belanja modal untuk pengadaan mobil dinas pejabat dikurangi dan dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah sehingga pendidikan masyarakat meningkat dan tepat mengenai salah satu dimensi IPM yaitu dimensi pengetahuan. Akhirnya, setiap pengelolaan keuangan daerah juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir hasil pemeriksaan yang terindikasi kerugian Negara oleh BPK. Kajian ini menunjukkan semakin tinggi hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara, maka semakin rendah nilai IPM.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan saudara, Irwan Trinugroho SE., M.Sc., PhD., atas bimbingannya dalam melakukan pengujian statistik dalam kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. & Djazuli, A. (2015). "Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013". *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Volume 1 (1), 1-19.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014. <http://www.bpk.go.id>
- BPS Kabupaten Tapanuli Tengah. (2012). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah 2011*. Tapanuli Tengah : BPS.
- Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 2013. (2013). Diakses tanggal 30 September 2015 dari <http://sumut.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/id/157>
- Kurniasih, L. & Marfiana, N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Unsoed*, 3(1), 2-16.
- Mustikarini, W. A. & Fitriyanti, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007". *Simposium Nasional Akuntansi XV*: Banjarmasin.
- Prasetyaningsih, E. (2015). "Pengaruh Karakteristik Keuangan Daerah dan Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah pada Pemerintah Daerah Se-Indonesia". Tesis Magister Akuntansi. FEUNS. Surakarta.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan

Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*. 8 (1), 1-194.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Data Penelitian atas 1 Pemerintah Provinsi, 8 Pemerintah Kota dan 25 Kabupaten di Sumatera Utara  
selama 2011-2013

Pemerintah Daerah	Tahun	IPM	Total Aset	BM	HP	L N _ Aset	LN_BM	LN_HP
Asahan	2011	73.02	1,377,039.68	179,238.41	634.66	14.14	12.09647	6.453089422
Asahan	2012	73.80	1,657,137.85	259,227.36	1,287.47	14.32	12.46546	7.160434331
Asahan	2013	74.23	2,727,281.81	271,753.13	1,809.21	14.82	12.51265	7.500645565
Binjai	2011	76.78	1,518,491.76	131,939.90	74.51	14.23	11.7901	4.310933345
Binjai	2012	77.36	1,678,672.89	158,209.03	725.26	14.33	11.97167	6.586530211
Binjai	2013	77.79	2,408,639.93	133,102.68	3,732.96	14.69	11.79888	8.224956764
Batu Bara	2011	72.05	646,848.36	138,479.93	1,603.52	13.38	11.83848	7.379956492
Batu Bara	2012	72.71	836,928.38	168,742.40	890.17	13.64	12.03613	6.791412456
Batu Bara	2013	73.26	1,180,856.07	205,203.30	5,348.41	13.98	12.23176	8.584554599
Dairi	2011	73.48	1,481,002.74	74,602.21	225.32	14.21	11.21993	5.417521614
Dairi	2012	73.86	1,565,296.65	97,984.28	1,400.43	14.26	11.49256	7.244534611
Dairi	2013	74.22	1,738,218.94	138,859.86	1,884.24	14.37	11.84122	7.541279836
Deli Serdang	2011	75.62	3,644,640.40	314,745.97	47.78	15.11	12.65952	3.866607142
Deli Serdang	2012	76.17	4,016,864.71	334,254.37	13,294.81	15.21	12.71966	9.495129012
Deli Serdang	2013	76.82	4,245,917.80	352,334.31	2,916.52	15.26	12.77234	7.978146404
Gunungsitoli	2011	72.33	214,743.93	136,449.47	744.61	12.28	11.82371	6.612860591
Gunungsitoli	2012	72.61	410,700.20	149,728.92	1,314.38	12.93	11.91658	7.181120351
Gunungsitoli	2013	72.99	590,465.08	165,703.39	2,233.07	13.29	12.01795	7.711132599
Humbang Hasundutan	2011	72.36	1,021,457.46	78,728.76	181.88	13.84	11.27376	5.203347129
Humbang Hasundutan	2012	72.80	1,207,679.96	124,492.94	222.90	14.00	11.732	5.40672324
Humbang Hasundutan	2013	73.09	1,463,110.34	190,867.26	243.83	14.20	12.15933	5.496471261
Karo	2011	75.73	1,695,729.28	128,447.91	266.38	14.34	11.76328	5.584923861
Karo	2012	76.22	1,891,271.20	153,195.51	739.70	14.45	11.93947	6.606244699
Karo	2013	76.76	2,125,571.24	245,358.71	1,432.67	14.57	12.41048	7.267295115
Langkat	2011	73.51	2,151,393.00	119,040.07	1,062.31	14.58	11.68722	6.968201061
Langkat	2012	73.98	2,560,852.33	255,052.59	2,067.76	14.76	12.44923	7.634221175
Langkat	2013	74.38	3,025,497.67	308,212.15	2,831.34	14.92	12.63854	7.948505377
Labuhanbatu	2011	74.53	1,584,299.17	115,453.81	12.90	14.28	11.65663	2.557227311

Pemerintah Daerah	Tahun	IPM	Total Aset	BM	HP	L N _ Aset	LN_BM	LN_HP
Labuhanbatu	2012	75.29	1,691,746.21	204,122.93	3,239.10	14.34	12.22648	8.083050792
Labuhanbatu	2013	75.71	1,872,065.38	226,693.80	1,380.91	14.44	12.33136	7.230497981
Labuhanbatu Selatan	2011	74.12	809,098.39	146,176.75	2,589.52	13.60	11.89257	7.859227809
Labuhanbatu Selatan	2012	74.90	1,049,603.15	145,200.52	2,620.92	13.86	11.88587	7.87128068
Labuhanbatu Selatan	2013	75.48	1,449,623.62	335,066.62	2,269.85	14.19	12.72208	7.727469029
Labuhanbatu Utara	2011	73.85	875,683.72	141,022.14	1,365.16	13.68	11.85667	7.219026917
Labuhanbatu Utara	2012	74.92	1,175,320.15	250,093.42	973.65	13.98	12.42959	6.881051896
Labuhanbatu Utara	2013	75.7	1,558,861.55	292,435.77	2,200.98	14.26	12.586	7.696657995
Medan	2011	77.68	22,858,193.51	681,884.04	5,284.33	16.94	13.43261	8.572501116
Medan	2012	78.25	24,132,628.57	558,428.74	3,786.39	17.00	13.23288	8.239168338
Medan	2013	78.62	24,793,716.38	630,802.96	1,958.93	17.03	13.35475	7.580153685
Mandailing Natal	2011	71	1,782,775.94	88,218.12	108.24	14.39	11.38757	4.684350984
Mandailing Natal	2012	71.44	1,982,217.46	133,046.75	2,105.92	14.50	11.79846	7.652507705
Mandailing Natal	2013	71.72	2,170,649.60	141,626.20	2,917.25	14.59	11.86095	7.978396671
Nias	2011	69.03	1,093,843.49	144,051.48	892.26	13.91	11.87793	6.79375757
Nias	2012	69.55	1,132,792.37	153,104.93	978.34	13.94	11.93888	6.885857258
Nias	2013	69.93	1,705,792.09	173,429.30	333.91	14.35	12.06353	5.810871496
Nias Barat	2011	67.05	206,986.37	116,297.43	926.37	12.24	11.66391	6.831273723
Nias Barat	2012	67.59	363,216.24	106,216.60	1,478.56	12.80	11.57324	7.29882392
Nias Barat	2013	67.91	521,720.76	161,068.00	2,978.72	13.16	11.98958	7.999248957
Nias Selatan	2011	67.7	915,200.33	96,214.57	3,991.60	13.73	11.47434	8.291947432
Nias Selatan	2012	68.23	1,055,228.40	202,753.56	28,783.04	13.87	12.21975	10.2675416
Nias Selatan	2013	68.58	1,216,268.88	208,691.80	5,034.06	14.01	12.24861	8.523982095
Nias Utara	2011	68.05	158,428.63	94,492.87	2,115.48	11.97	11.45628	7.657037016
Nias Utara	2012	68.71	274,389.29	107,448.01	957.72	12.52	11.58476	6.86455546
Nias Utara	2013	69.39	575,873.74	184,356.21	372.35	13.26	12.12463	5.919834272
Padang Lawas	2011	72.47	2,282,733.26	130,125.82	7,869.25	14.64	11.77626	8.970718038
Padang Lawas	2012	72.96	602,671.73	116,853.86	7,650.80	13.31	11.66868	8.942565497
Padang Lawas	2013	73.27	772,221.17	137,297.63	472.03	13.56	11.82991	6.157042543

Pemerintah Daerah	Tahun	IPM	Total Aset	BM	HP	L N Aset	LN_BM	LN_HP
Padang Lawas Utara	2011	73.11	966,861.01	161,465.04	2,115.29	13.78	11.99204	7.656947198
Padang Lawas Utara	2012	73.59	1,243,801.36	232,918.13	750.02	14.03	12.35844	6.620099873
Padang Lawas Utara	2013	73.96	1,510,929.75	193,425.84	2,196.96	14.23	12.17265	7.694829866
Padangsidempuan	2011	75.53	688,381.13	75,776.37	1,074.17	13.44	11.23554	6.979303549
Padangsidempuan	2012	76.04	698,832.33	98,758.77	201.69	13.46	11.50044	5.306731865
Padangsidempuan	2013	76.31	1,500,325.05	117,216.92	1,123.38	14.22	11.67178	7.024097277
Pakpak Bharat	2011	71.75	755,424.26	113,488.21	-	13.54	11.63945	0
Pakpak Bharat	2012	72.00	894,037.55	70,238.47	1,250.87	13.70	11.15965	7.131594588
Pakpak Bharat	2013	72.54	980,753.21	147,986.63	826.15	13.80	11.90488	6.716776355
Pematangsiantar	2011	77.82	2,023,024.62	73,017.23	426.21	14.52	11.19845	6.054932183
Pematangsiantar	2012	78.27	2,227,194.22	90,831.87	633.95	14.62	11.41677	6.451970087
Pematangsiantar	2013	78.62	2,355,388.51	134,009.85	1,427.16	14.67	11.80567	7.263441735
Sibolga	2011	75.42	1,158,207.83	89,963.71	176.80	13.96	11.40716	5.17501915
Sibolga	2012	75.73	1,264,237.03	90,900.19	5,667.10	14.05	11.41752	8.642432802
Sibolga	2013	76.19	1,388,843.46	87,060.36	326.65	14.14	11.37436	5.788889261
Samosir	2011	74.12	711,541.50	119,695.96	374.39	13.48	11.69271	5.925298035
Samosir	2012	74.72	1,386,688.04	85,423.66	568.83	14.14	11.35538	6.34358162
Samosir	2013	75.02	1,567,827.18	162,439.73	693.75	14.27	11.99806	6.542111665
Serdang Bedagai	2011	73.58	775,795.54	124,131.68	20.41	13.56	11.7291	3.016024977
Serdang Bedagai	2012	74.07	989,376.05	148,712.58	954.57	13.80	11.90977	6.861260977
Serdang Bedagai	2013	74.41	1,289,723.46	250,621.75	1,032.29	14.07	12.4317	6.939534914
Simalungun	2011	73.84	1,448,730.45	132,102.43	408.69	14.19	11.79133	6.012956922
Simalungun	2012	74.35	1,740,066.09	314,891.54	348.49	14.37	12.65998	5.853609535
Simalungun	2013	74.55	1,909,964.82	234,348.47	1,040.33	14.46	12.36456	6.947293249
Sumatera Utara	2011	74.53	12,199,119.52	1,063,237.38	25,616.44	16.32	13.87683	10.15098961
Sumatera Utara	2012	75.13	13,159,670.20	803,607.60	14,932.40	16.39	13.59687	9.611288628
Sumatera Utara	2013	75.55	14,583,981.92	760,722.42	4,468.98	16.50	13.54202	8.404915474
Tanjungbalai	2011	74.61	1,199,137.81	92,005.73	208.08	14.00	11.42961	5.337922621
Tanjungbalai	2012	75.06	1,360,187.97	114,085.31	8,983.53	14.12	11.6447	9.10314818

Pemerintah Daerah	Tahun	IPM	Total Aset	BM	HP	L N _ Aset	LN_BM	LN_HP
Tanjungbalai	2013	75.44	1,611,334.48	108,800.29	3,419.10	14.29	11.59727	8.137132638
Tapanuli Selatan	2011	74.39	1,226,048.59	137,835.76	371.77	14.02	11.83382	5.918275383
Tapanuli Selatan	2012	74.78	1,530,288.96	194,193.71	845.36	14.24	12.17661	6.739762572
Tapanuli Selatan	2013	75.13	1,787,356.74	267,454.27	898.92	14.40	12.4967	6.801194043
Tapanuli Tengah	2011	71.54	1,381,286.55	99,683.22	1,103.83	14.14	11.50975	7.006541229
Tapanuli Tengah	2012	72.04	1,171,046.79	154,199.80	2,651.52	13.97	11.946	7.882888339
Tapanuli Tengah	2013	72.55	1,455,706.75	258,593.44	280.51	14.19	12.46301	5.636609375
Tapanuli Utara	2011	74.77	1,184,407.71	168,143.61	1,025.97	13.98	12.03257	6.933393786
Tapanuli Utara	2012	75.33	1,340,615.24	171,508.17	594.85	14.11	12.05239	6.388309273
Tapanuli Utara	2013	75.81	1,429,547.66	206,895.52	4,030.96	14.17	12.23997	8.30175984
Tebing Tinggi	2011	76.86	1,008,299.37	93,702.90	1,026.06	13.82	11.44788	6.933481504
Tebing Tinggi	2012	77.34	1,118,331.98	97,955.39	200.61	13.93	11.49227	5.301362725
Tebing Tinggi	2013	77.96	1,365,309.86	160,860.32	3,063.57	14.13	11.9882	8.027336182
Toba Samosir	2011	76.88	1,053,837.13	104,552.70	243.55	13.87	11.55745	5.49532226
Toba Samosir	2012	77.21	1,343,730.90	153,980.87	221.21	14.11	11.94458	5.399112477
Toba Samosir	2013	77.49	1,560,847.72	125,576.94	1,935.35	14.26	11.74067	7.568043468